

REVOLUSI PENDIDIKAN ETIKA AKUNTAN INDONESIA: MEMBUMIKAN SPIRIT PENDIDIKAN TAN MALAKA

Habib Muhammad Shahib

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar Makassar
muh.shahib@unifa.ac.id

ABSTRACT

The Ethics issue is one of the accountant global problems, including the accountant in Indonesia. Allegedly, the basic problem of why ethics issues always happened is based on the accountant education process. This paper is trying to examine an alternative education model based on Tan Malaka's educational perspective that have a basis in the real situations of Indonesians and stand with the Indonesians' interests. Hopefully, by using Tan Malaka's educational perspective, it can deliver a new model of ethics education in accounting field and the ethical accountants in the future. Especially, the accountants that stand with the nation and Indonesians interests.

Keywords: Ethics, Accountant, Education, Tan Malaka, Indonesians

A. PENDAHULUAN

*Kekuasaan Kaum–Modal Berdiri atas didikan yang berdasar kemodalan.
Kekuasaan Rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan.
Tan Malaka (1921)*

Indonesia telah memasuki dasawarsa kedua dalam era reformasi, era dimana reformasi birokrasi dan penegakan hukum melawan perilaku korup terus digalakkan diseantero negeri. Meski demikian, posisi Indonesia di mata dunia masih lekat dengan citra negeri dengan tingkat korupsi dan pelanggaran hukum yang tinggi (Transparency International, 2015). Menyedihkannya lagi, hampir semua masalah korupsi umumnya terjadi dengan salah satu aktornya adalah akuntan (Ludigdo dan Kamayanti, 2012).Tengoklah skandal akuntansi yang terjadi, mulai dari kasus audit Kimia Farma dan Bank Lippo (Ludigdo dan Kamayanti, 2012), kasus audit bank-bank yang telah dibekukan pemerintah (Trisnaningsih, 2007; Ludigdo dan Kamayanti, 2012) penggelapan pajak di sektor swasta yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) (Ludigdo dan Kamayanti, 2012) hingga kasus Gayus (Ludigdo dan Kamayanti, 2012) yang lebih dikenal publik sebagai kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai pajak. Belum lagi dengan pelanggaran-pelanggaran peraturan keuangan yang sering kali terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berujung dijatuhkannya sanksi oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) kepada perusahaan bahkan hingga ke tingkat akuntan internal perusahaan dalam bentuk denda hingga hukuman pidana (Shahib dan Irwandi, 2016).

Melihat latar belakang para akuntan yang terjebak dalam perilaku melanggar hukum tersebut. Pertanyaan besar kemudian hadir, mengapa banyak akuntan Indonesia dapat terjebak dalam kasus-kasus itu? Bukankah selama ini, alur profesi akuntan di Indonesia, terus berbenah demi menyejajarkan diri dengan profesi akuntan dunia. Mulai dari adopsi standar akuntansi, alur dan gaya pendidikan, hingga adopsi kode etik akuntan (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012). Untuk menjawab pertanyaan besar nan mendasar tersebut, pendapat Russell dan Smith (2003) layak di pertimbangkan. Russell dan Smith (2003) berpendapat bahwa yang paling layak untuk disalahkan jika melihat fenomena *unethical behaviour* para akuntan yang berujung pada skandal-skandal kecurangan keuangan adalah sistem pendidikan akuntansi. Dikarenakan, pendidikan akuntansi merupakan hulu atau pokok dari pembangunan mental dan kemampuan akuntan. Logikanya, jika proses pendidikan akuntansi baik dan memberikan porsi dan model pembelajaran yang tepat bagi pembangunan etika akuntan. Maka pelanggaran etika akuntan di masa depan dan di masa kini dapat ditekan (Russell dan Smith, 2003; Williams dan Elson, 2010).

Lebih lanjut, Williams dan Elson (2010) menambahkan sejak kasus Enron mengemuka hingga kasus-kasus pelanggaran etika akuntan lainnya. Secara umum, model pembelajaran etika akuntan tidak mendapat perhatian khusus. Meski pengembangan standar etika dan standar hukum atas pelanggaran etika seperti *Sarbaner Oxley Act 2002* dan peraturan lainnya terus digalakkan. Pembelajaran akuntansi dan etika akuntan seakan terpisah, bahkan hingga memunculkan tindakan *stereotype* dari para pendidik dan peserta didik, mereka seringkali mengemukakan alasan bahwa karena etika akuntan tidak memiliki porsi yang besar dalam ujian *Certified Public Accountant* (CPA) maka pemahaman akan etika akuntan tidak perlu mendominasi ruang-ruang kelas sebagaimana yang dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan akuntansi di Amerika (Bean dan Bernardi, 2005; Chan dan Leung, 2006; Blanthorne *et al.*, 2007; Williams dan Elson, 2010; Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012). Hal tersebut juga dapat dilihat dalam lingkup Indonesia, pendidikan etika akuntan, utamanya melalui kurikulum dan model pembelajarannya yang cenderung hanya mengadopsi model

pendidikan etika bisnis dunia Barat dan terlihat belum mampu untuk menyelesaikan masalah etika akuntan Indonesia (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012).

Selaras dengan penjelasan tersebut, pemahaman akan konteks etika dan bagaimana etika akuntan itu seharusnya diajarkan menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Merujuk pada pendapat Burrell dan Morgan (1979), suatu konteks sosial sangat terikat dengan infrastruktur sosial yang membangunnya seperti sejarah, budaya, serta kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Sehingga dalam memahami suatu konteks sosial menjadi wajib untuk mengetahui infrastruktur sosial yang membangunnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, globalisasi dan universalitas suatu nilai tidak menjamin suatu pendekatan tertentu dapat diadopsi diseluruh penjuru dunia, sebab masing-masing konteks sosial memiliki keunikannya sendiri (Fakih, 2001).

Berkaca dari hal tersebut, dalam menilai dan mendesain pendidikan akuntansi sebagai pondasi etika akuntan, khususnya dalam konteks Indonesia. Memahami infrastruktur sosial Indonesia menjadi wajib dilakukan terlebih dahulu, sebelum masuk ke bagaimana model terbaik pendidikan etika akuntan diberikan. Atas dasar itu, jurnal kualitatif ini akan mencoba untuk menilai, mengembangkan dan menawarkan konsep pendidikan etika akuntan yang sesuai dengan konteks Indonesia sebagai suatu Bangsa yang besar. Dengan meminjam cara pandang dan laku pendidikan Indonesia dari salah satu Bapak Bangsa Indonesia, yakni Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang lebih populer dengan nama Tan Malaka.

Terdapat beberapa alasan mengapa cara pandang dan laku pendidikan Tan Malaka dipilih sebagai hal yang patut untuk dikaji dalam membangun model pendidikan etika akuntan di Indonesia. Pertama, sebagai salah satu Bapak Bangsa, Tan Malaka dikenal sebagai seorang aktivis pergerakan kemerdekaan sekaligus perintis sekolah rakyat Sarekat Islam di Semarang yang resmi dibuka pada tanggal 21 Juni 1921 (Malaka, 1921; Poeze, 2008), setahun lebih awal dibandingkan Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro yang didirikan pada 3 Juli 1922, yang mana sekolah tersebut memiliki model dan kurikulum yang khas rakyat Indonesia. Kedua, Tan Malaka termasuk aktivis pergerakan kemerdekaan yang sangat aktif menuliskan gagasan-gagasannya, tercatat sebanyak 20an bukunya telah tercetak, yang paling fenomenal adalah MADILOG (Materialisme, Dialektika, Logika) (Malaka, 1943) yang bisa dikatakan sebagai penjelas Filsafat Pendidikan untuk bangsa Indonesia. Ketiga, pembahasan model pendidikan Tan

Malaka cenderung tenggelam oleh model pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara akibat politik identitas yang dikembangkan Orde Baru yang memasukkan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh yang pemikirannya tidak boleh dibahas (Poeze, 2008; Syaifudin, 2012), sehingga pemikiran-pemikiran Tan Malaka khususnya tentang pendidikan kurang akrab di mayoritas bangsa Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka pembahasan tentang model pendidikan Tan Malaka dapat dikatakan akan menambah warna bahkan dapat menjadi landasan baru dalam merevolusi model pendidikan Indonesia yang semakin hari semakin menjauhkan para pengajar dan pelajar dari realitas sosial keindonesiaannya (Syaifudin, 2012), khususnya dalam membentuk mental dan etika bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan di berbagai bidang. Sebagaimana yang juga masih dibutuhkan dalam proses pendidikan etika akuntan di Indonesia yang saat ini terus dipertanyakan efektifitasnya dalam melahirkan akuntan-akuntan yang beretika (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012).

B. PEMBAHASAN

Dalam membahas pendidikan etika akuntan, khususnya dalam konteks etika bisnis modern, umumnya beberapa pertanyaan yang seringkali mengemuka adalah (1) siapa yang seharusnya mengajarkan etika (2) apakah etika harus diajarkan dalam satu jenis matakuliah saja? (Weiss, 2009; Williams dan Elson, 2010) dan (3) bagaimana cara efektif dalam mengajarkannya? (Loeb, 2015). Perdebatan atas jawaban dari pertanyaan tersebut hingga kini terus menerus direproduksi dalam berbagai jurnal ilmiah populer (Weiss, 2009; Williams dan Elson, 2010; Loeb, 2015). Namun demikian, umumnya dibahas dalam perspektif struktur sosial dunia “Barat” yang diwakili oleh logika bisnis Amerika dan negara-negara Eropa Barat secara umum, dengan pendekatan yang cenderung reaktif, yakni pendidikan etika bisnis cenderung dihadirkan atau diperbaiki kurikulumnya setelah terjadi kasus-kasus etika besar dalam dunia bisnis (Bean dan Bernardi, 2005; Blanthorne *et al.*, 2007; Weiss, 2009; Williams dan Elson, 2010). Cenderung menafikan pembahasan dengan pendekatan filosofis serta dengan pendekatan yang dari berasal dari luar perspektif pemikiran “Barat”. Bahkan cenderung memaksakan satu pendapat atas etika akuntan dan model pendidikannya melalui organisasi profesi Internasional seperti *International Federation of Accountant (IFAC)* kepada negara-negara anggotanya (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012). Poin ini kemudian memunculkan celah, untuk mengkaji pendidikan etika akuntan dari

perspektif berbeda, khususnya dalam konteks Indonesia dengan meminjam filosofi dan metode pendidikan Tan Malaka sebagai salah satu contohnya.

1. Filosofi Pendidikan Tan Malaka

Sebagai seorang lulusan sekolah Guru *Rijkskweekschool* di Belanda yang dididik dalam lingkungan pendidikan Eropa pasca revolusi Industri (Poeze, 2008). Tan Malaka akrab dengan banyak ide dan pemikiran Eropa (Malaka, 1943; Poeze, 2008). Namun demikian, Tan Malaka tidak menjadikannya sebagai suatu kebenaran mutlak yang harus diikuti dan diimplementasikan secara langsung di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakannya:

“...Akuilah dengan hati bersih bahwa kalian dapat belajar dari orang Barat. Tapi Jangan sekali-kali kalian meniru dari orang barat. Kalian harus menjadi murid-murid dari Timur yang cerdas..” (Malaka, 1943)

Secara tersirat, melalui tulisannya, Tan Malaka mengajak masyarakat Indonesia untuk **“jujur”** bahwa memang masyarakat Barat saat itu lebih maju ilmu pengetahuannya sehingga mempelajari ilmunya merupakan suatu keharusan agar dapat menjadi murid Timur yang **“cerdas”**. Pertanyaan kemudian muncul, apa standar murid timur (baca: rakyat Indonesia) dapat dikatakan “cerdas”? Tan Malaka kemudian memberikan standar:

“...Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali....” (Malaka, 1943)

Menurut hemat penulis, standar kecerdasan rakyat Indonesia menurut Tan Malaka jika berdasarkan kutipan tersebut terletak dalam dua hal. Satu, kecerdasan sebagai hasil dari proses pendidikan, dinilai ketika para pelajar Indonesia mampu melebur dengan masyarakat kecil dalam artian aktif terlibat untuk mengentaskan permasalahan sosial yang membelit masyarakat kecil. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan, pelajar Indonesia yang cerdas menurut Tan Malaka adalah mereka yang memiliki empati kepada rakyat kecil dan aktif untuk mengangkat derajat masyarakat kecil. Dua, kecerdasan juga terlihat dalam hal bagaimana pengetahuan yang diberikan kepada pelajar dapat terinternalisasi dalam laku perilaku pelajar sehari-hari seperti

tangguh, percaya diri dan penuh harga diri dalam mengawal dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Tan Malaka menambahkan, kemajuan pengetahuan dan peradaban bagi rakyat Indonesia hanya dapat dicapai dengan cara mendidik masyarakat “kelas pekerja-mesin” (baca: kelas pekerja industri) yang dianggapnya sebagai tulang punggung Indonesia merdeka. Agar Indonesia merdeka dapat terus bertahan sepanjang masa. Menarik jika mengkaji pernyataan Tan Malaka, mengapa harus kelas pekerja industri yang mendapatkan porsi pendidikan yang lebih untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Tan Malaka dalam Madilong (Malaka, 1943):

“...Klas tani itu penting, klas saudagar di dunia sekarang berguna, klas intelek berguna-penting, tetapi tak-ber-klas pekerja-mesin, Indonesia merdeka pasti tak akan bisa berdiri dan kalau berdiri tak akan bisa teguh dan lama....”

Jika melihat pernyataan Tan Malaka tersebut, beberapa hal kemudian dapat diambil sebagai saripati pemikirannya dan pembelajaran untuk merancang pendidikan yang khas rakyat Indonesia. Meski telah 71 tahun Indonesia merdeka, komposisi masyarakat Indonesia tidak banyak berubah. Tulang punggung penggerak ekonomi Indonesia adalah tetap kelas pekerja industri. Mulai dari buruh kasar hingga buruh kerah putih di gedung-gedung pencakar langit. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan *International Labor Organization* (ILO) hingga tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam klasifikasi pekerja (penduduk 15 tahun keatas) adalah sebesar 120 juta jiwa dengan 46 juta jiwa atau 38% pekerja di bidang industri buruh/karyawan/pegawai (ILO, 2015; BPS, 2016). Pekerja di bidang Industri memiliki komposisi tertinggi dibandingkan dengan jenis pekerja lain.

Mengapa pekerja di bidang Industri terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia? Hal ini dapat dimengerti dengan penjelasan teori ekonomi Marxis (Fakih, 2001; Poli, 2010). Sejak revolusi Industri bergulir di rentang tahun 1750-1850, kelas masyarakat juga ikut berubah, yakni hadirnya kelas pekerja dan kelas pemilik modal atau alat produksi. Kelas pekerja merupakan kelas masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan modal produksi, yang mereka miliki hanya jasa dan tenaga kerja yang kemudian akan ditukarkan dengan upah dari para pemilik modal (Poli, 2010). Sayangnya, untuk konteks Indonesia kini, para pemilik modal masih

didominasi oleh pemilik modal asing dengan jumlah penanaman modal terakhir di tahun 2016 sebesar Rp 96,1 triliun (66%) sedangkan penanaman modal dalam negeri hanya sebesar Rp 50,4 triliun (34%) (BKPM, 2016). Maka jangan heran, jika berdirikari (berdiri diatas kaki sendiri) sebagai jargon ekonomi Bung Karno tidak dapat benar-benar hadir di tengah-tengah Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia yang mayoritas kaum pekerja tidak memiliki posisi tawar yang kuat sebab hanya memiliki tenaga dan keahlian kerja sehingga rentan untuk diPHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak dan terus dikungkung dengan kebijakan upah murah. Karena begitulah logika bisnis internasional yang disuntikkan ke dalam negeri melalui globalisasi, kepeduliannya pada pekerja dan negara tempat dimana mereka beroperasi semata semu dan sementara sebab memaksimalkan profit tetap tujuan utamanya (Weiss, 2009; Rodrik, 2012).

Hal-hal itulah yang telah lama di risaukan oleh Tan Malaka, sehingga ruang pendidikan sebagai tempat persiapan kelas pekerja haruslah didesain sedemikian rupa agar para pelajar dapat memahami bagaimana seharusnya mereka bertindak guna mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai pekerja nantinya. Selain itu, agar pendidikan rakyat Indonesia menghasilkan putra-puteri Indonesia yang dengan ilmunya memiliki keberpihakan bagi kepentingan rakyat indonesia sebagai tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah membahas dan mengetahui bahwa filosofi pendidikan Tan Malaka. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana membumikan atau mengaplikasikan filsafat pendidikan Tan Malaka tersebut? Untuk menjawabnya pembahasan tentang metode pendidikan Tan Malaka dihadirkan sebagai berikut.

2. Metode Pendidikan Tan Malaka

Pelacakan metode pendidikan Tan Malaka sangat tepat jika dimulai dari karya utamanya yakni MADILOG yang dikatakannya sebagai buku penjelas tentang cara berpikir untuk rakyat Indonesia (Malaka, 1943). Dalam madilog, Tan Malaka menjabarkan:

*“...Dari cara orang berpikir itu kita dapat duga filsafatnya dan dari filsafatnya kita dapat tahu dengan cara dengan metode apa dia sampai ke filsafat itu”
(Malaka, 1943)*

Secara tersirat, ungkapan tersebut bermakna, suatu “cara berpikir” sangat dipengaruhi atau bahkan dapat dikatakan berdasarkan pada suatu pandangan filsafat tertentu. Yang mana hal ini juga diamini oleh pemikir sosiologi seperti Burrell dan Morgan (1979).

Cara pendidikan Tan Malaka secara runtut disajikan sebagai berikut:

a. Pendidikan haruslah dimulai dengan pemahaman yang benar atas dunia empiris dengan menggunakan MADIALOG

Tan Malaka percaya bahwa semua persoalan yang dapat diinderai adalah persoalan yang dapat dicari solusinya (Malaka, 1943). Dalam proses mendidik pelajar dan rakyat Indonesia untuk memahami dunia empiris atau realitas sosial, Tan Malaka menawarkan cara berpikir MADIALOG (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Pertanyaan kemudian muncul, mengapa harus menggunakan ketiga alat tersebut? Tan Malaka berpendapat, tata cara berpikir rakyat Indonesia sangat terkungkung oleh cara berpikir yang bersandar pada kekuasaan Tuhan atau alam gaib semata. Yang Tan Malaka istilahkan sebagai logika mistika (Malaka, 1943). Pendapat Tan Malaka ini bukan berarti dia anti Tuhan. Tan Malaka berpendapat, hampir semua yang terjadi di alam raya ini sudah dihadirkan (*matter*) dengan hukum alam oleh Tuhan sehingga manusia harus mampu menyibaknya dengan kemampuan berpikirnya. Dengan menggunakan pendekatan Materialisme, Dialektika, dan Logika maka pemecahan masalah sosial yang riil dapat dilakukan (Malaka, 1943).

Dapat disimpulkan, MADIALOG adalah suatu panduan berpikir dan penyadaran yang membangunkan rakyat Indonesia, bahwa, semua masalah yang dihadapi rakyat Indonesia bukan merupakan bentukan otomatis nan ajaib dari “langit”. Namun merupakan hasil interaksi ekonomi, sosial, budaya, hingga geografis yang semuanya dapat dikaji, dikritisi, bahkan dapat diubah menjadi yang lebih baik.

b. Pendidikan haruslah dijumpai dengan contoh-contoh riil yang menjadi masalah rakyat

Selanjutnya, Tan Malaka percaya bahwa model pendidikan rakyat terbaik adalah model pendidikan yang didasarkan realitas rakyat itu sendiri yang berbasis contoh-contoh riil yang menjadi masalah rakyat (Malaka, 1921). Tan Malaka mencontohkan dalam konteks perjuangan kemerdekaan ketika dia mengembangkan Sekolah Rakyat Sarekat Islam (SI) Semarang. Masalah yang utama hadir ketika itu adalah masih banyak rakyat yang takut berbicara tentang kemerdekaan, dan penindasan yang dilakukan oleh

pemerintah kolonial. Apa yang menyebabkan rakyat pada saat itu takut? Tidak lain, tidak bukan, adalah disebabkan karena ketidaktahuan yang benar tentang pemerintah kolonial karena rakyat pada saat itu banyak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, seperti tidak dapat membaca, berhitung mengutarakan pendapat dan berbahasa Belanda dan Melayu yang merupakan bahasa resmi saat itu (Malaka, 1921).

c. Pendidikan haruslah melatih kepekaan dan kesadaran sosial pelajar

Tan Malaka percaya, bahwa kesadaran dan kepekaan sebagai rakyat yang tertindas harus dilatih dan dibangun sedini mungkin (Malaka, 1921, 1943). Sebab berlaku hukum sejarah, rakyat dapat terlena atau dibuat tertipu oleh penguasa. Hal yang mana sangat ditentang Tan Malaka sebagai salah satu faktor penyebab lamanya Belanda menjajah Indonesia (Malaka, 1943).

3. Membumikan Spirit Pendidikan Tan Malaka dalam Pendidikan Etika Akuntan

Setelah membahas bagaimana model pendidikan Tan Malaka, saatnya membahas bagaimana spirit tersebut dibumikan (diimplementasikan) ke dalam pendidikan etika akuntan Indonesia saat ini? Dengan meminjam perspektif *critical perspective of accounting* (Neimark dan Tinker, 1986; Tinker dan Gray, 2003; Deegan, 2007). Membumikan spirit Tan Malaka tersebut menjadi suatu hal yang tidak mustahil.

Pandangan akuntansi kritis mendasarkan argumennya pada kondisi ada pihak atau wacana yang mendominasi dan di sisi lain ada yang didominasi. Khususnya yang memiliki modal dan kekuatan yang besar cenderung mendominasi golongan yang tidak mempunya (Deegan, 2007) dengan kondisi tersebut, maka para pendukung pandangan kritis mendorong untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik yakni hilangnya penindasan atau hadirnya tatanan atau model sosial yang baru yang lebih baik kepada semua golongan (Neimark dan Tinker, 1986; Tinker dan Gray, 2003).

Sebagaimana yang diketahui oleh kalangan akuntan Indonesia secara luas, masalah etika akuntan telah menjadi momok bagi perkembangan akuntan Indonesia ke depan (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012). Jika dikaji dengan perspektif kritis, hal tersebut merupakan hasil dari dominasi model akuntansi “Barat” yang diproksikan oleh standar akuntansi dan etika akuntan yang cenderung dipaksakan kepada Indonesia melalui organisasi-organisasi profesi Internasional (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012) untuk diterapkan mulai dari kelas perkuliahan hingga ke

ranah praktik akuntan. Sehingga secara langsung dan tidak langsung pemaksaan institusionalisasi ini menyebabkan ketidakcocokan bahkan memunculkan efek samping model akuntansi tersebut terhadap profesi akuntan Indonesia. Seperti kecurangan, penggelapan pajak, dan menghadirkan laporan audit yang sesuai pesanan sebagaimana masalah-masalah tersebut juga terjadi di negara asal standar akuntansi dan etika tersebut (Weiss, 2009).

Jika melihat kondisi tersebut, hal itu memiliki kesamaan dengan konteks yang dihadapi oleh Tan Malaka di masa pra kemerdekaan, yaitu pendidikan untuk rakyat Hindia Belanda dalam rangka politik etis pemerintah kolonial Belanda (Teja, 2016). Pada waktu itu, meski pendidikan telah hadir di tengah rakyat Hindia Belanda, namun semangat pendidikan tersebut adalah semangat untuk melanggengkan penjajahan dan penindasan kolonial Belanda atas bumi Nusantara. Sehingga, Tan Malaka menghadirkan Sekolah Rakyat SI sebagai antitesanya (Malaka, 1921; Teja, 2016). Agar anak sekaligus pelajar Indonesia dapat menjadi generasi Indonesia yang siap untuk menyongsong kemerdekaan (Malaka, 1921). Dengan konteks yang hampir sama, pendidikan akuntan dapat diubah dan dihadirkan sesuai dengan konteks tuntutan zaman dengan meminjam model pendidikan Tan Malaka yang sangat anti penindasan dan penjajahan apapun bentuknya (Malaka, 1921, 1943). Menurut penulis beberapa hal yang mungkin untuk dilakukan dengan meminjam model pendidikan Tan Malaka untuk membebaskan akuntan Indonesia dari masalah etika adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Etika Akuntan haruslah dimulai dengan pemahaman yang benar atas dunia empiris dengan menggunakan MADILOG

Dapat disaksikan pendidikan Akuntan Indonesia hari ini sangat berorientasi pasar seringkali menafikan peranan pendidikan filsafat dan logika yang benar. Buktinya dapat disaksikan secara online melalui website kampus, kampus-kampus besar di Indonesia tidak memasukkan pendidikan filsafat serta logika dalam ruang-ruang kelas perkuliahannya, khususnya pada tingkat strata satu (S1). Hal ini tentu saja menjadi masalah yang serius, sebab dengan menjauhkan para mahasiswa dengan kajian filsafat dan logika yang mampu mempertajam akal dan perasaannya menjadikan para mahasiswa tersebut hanya seperti “hasil produksi” yang siap untuk di pasarkan ketika telah menyelesaikan studi. Hal tersebut kemudian terus membuka ruang untuk hadirnya

generasi akuntan yang apatis dan hanya berorientasi materi yang sangat rentan melakukan pelanggaran etika di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya, pun kemudian jika akhirnya matakuliah filsafat dan logika dihadirkan dalam ruang-ruang kelas. Filsafat seperti apa yang seharusnya diajarkan. Sebagai pribadi, penulis menyarankan untuk menjadikan MADILOG sebagai buku acuan pembelajaran filsafat dan logika. Sebab MADILOG memiliki kekhasan pembahasan tentang infrastruktur sosial bangsa Indonesia yang dibahas dalam perspektif filsafat dan logika. Sehingga akan hadir para akuntan yang memiliki cara berpikir dan bertindak yang berpihak kepada rakyat Indonesia (Malaka, 1943). Diharapkan kesadaran akal dan hati para akuntan setelah mempelajari dan meresapi MADILOG akan bertumbuh dan bertahan agar masalah etika di masa depan dapat di tekan kehadirannya.

b. Pendidikan Etika Akuntan haruslah dijumpai dengan contoh-contoh riil yang dekat dengan Mahasiswa

Sebagaimana Tan Malaka, mempersiapkan rakyat biasa bahkan miskin sebagai pejuang kemerdekaan melalui sekolah rakyatnya (Malaka, 1921). Akuntan sebagai salah satu calon pekerja kerah putih, seharusnya dipersiapkan sebagai pengisi kemerdekaan agar kemerdekaan dapat dirasakan 100% di segala lini profesi, khususnya dalam profesi akuntan. Masalah etika akuntan yang masih sering terjadi di Indonesia cenderung membawa efek samping sekaligus efek domino kepada banyak rakyat Indonesia seperti terlambatnya pembangunan akibat kekurangan pendapatan pajak yang disunt oleh akuntan pajak, terancamnya kelas pekerja rendahan akibat manajemen laba yang dilakukan akuntan bersama sang pemilik modal, hingga kerusakan lingkungan akibat akuntan dengan senang hati mengerjakan proyeksi pendapatan investasi pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, yang berujung rusaknya alam Indonesia.

Atas dasar tersebut, pendidikan etika akuntan sudah selayaknya mempersiapkan calon-calon akuntan agar dapat memahami dengan benar etika dalam setiap dimensi pengajaran akuntansi. Tidak seperti saat ini, yang mana Etika akuntan hanya di ajarkan dalam satu sesi kelas selama satu semester. Sebagaimana Tan Malaka mempersiapkan anak-anak sekolah rakyatnya sebagai pejuang kemerdekaan dengan mengisi tiap subjek pelajaran dengan model dan contoh-contoh riil penindasan Belanda yang kemudian akan memunculkan sikap sadar dan memiliki keinginan bergerak untuk merebut

kemerdekaan (Malaka, 1921). Ada baiknya, pelajaran tentang etika pun seperti itu, etika akuntan tidak boleh hanya masuk dalam satu kelas khusus matakuliah etika akuntan saja. Namun, selayaknya masuk kedalam semua subjek yang diajarkan dalam kurikulum akuntansi. Seperti dalam akuntansi keuangan, ajarlah mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi manajemen laba sehingga mereka dapat menghindari atau melaporkan kejadiannya di masa depan, misal di akuntansi manajemen, tanamkan dalam jiwa para calon akuntan di tangan merekalah kepentingan hidup kelas pekerja rendah suatu pabrik dipertaruhkan dalam penyusunan anggaran gaji hingga ke pembagian bonus perusahaan, dan dalam Audit misal, tanamkanlah sifat-sifat yang seharusnya auditor pegang teguh dalam pelaksanaan audit dan pemberian *jasa assurance* dan *non assurance* lainnya. Hal yang menjadi penting juga untuk diingat, para pendidik yang akan mengampu suatu kelas akuntansi seharusnya secara rutin diupgrade pengetahuannya tentang masalah etika yang terjadi dalam lingkup subjek matakuliahnya agar keberlangsungan pengajaran etika dapat terus bertahan dan berkualitas.

c. *Pendidikan Akuntan haruslah melatih kepekaan dan kesadaran sosial*

Tan Malaka percaya tanpa rasa kepekaan dan kesadaran sosial yang dilatih terus menerus, kehadiran perubahan sosial hanyalah khayalan belaka (Malaka, 1921, 1943). Sebagaimana yang Tan Malaka lakukan dalam sekolah rakyat SI (Malaka, 1921), pembangunan rasa kepekaan sosial dapat dilakukan juga di ruang-ruang kelas SI akuntansi. Misalnya dengan cara, (1) Ajak mahasiswa akuntansi tidak hanya belajar dalam kelas semata, namun langsung terjun melihat kondisi riil masyarakat yang miskin di sekitar kampus yang terus berjuang bertahan hidup menggunakan pendapatan yang tidak seberapa, dorong mahasiswa akuntansi tersebut untuk mencoba menghadirkan solusi dalam bidang akuntansi kepada masyarakat tersebut seperti mengajarkannya mengelola bisnis dan keuangan secara sederhana atau membentuk koperasi pemulung agar taraf hidup masyarakat miskin tersebut dapat meningkat. Diharapkan dengan mereka dekat dengan realitas sosialnya, rasa kepekaan dan kesadarannya sebagai manusia Indonesia dapat terus terjaga dan bertumbuh sehingga menghadirkan calon-calon akuntan yang matang dalam aspek kognitif dan afektif yang jauh dari niat untuk melanggar etika akuntan di masa depan. (2) Wajibkan kepada mahasiswa akuntansi untuk terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa dengan cara mengakui kegiatan

organisasi mahasiswa tersebut sebagai satuan kredit semester (SKS) agar mereka terdorong untuk belajar memahami karakteristik masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka dan terlatih untuk bertindak atas kepentingan orang banyak serta membangun semangat pemimpin dan bawahan yang positif di masa depan.(3) Selain kepada mahasiswa sebaiknya dosen dan tenaga pengajar juga aktif dalam organisasi profesi demi mendorong kebaikan untuk kepentingan profesi dan rakyat luas, melalui organisasi profesi sebab sebagaimana yang diketahui secara umum, kehilangan legitimasi atas suatu ide kebaikan dalam suatu pusat pengambilan keputusan seperti organisasi profesi akuntan (Deegan, 2007) dapat memunculkan dominasi yang tidak sehat dalam perkembangan profesi. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang, seolah tidak ada gerakan untuk memunculkan model akuntansi dan standar etika yang khas Indonesia. Sebaliknya, organisasi profesi cenderung mengaminkan model-model akuntansi dari “Barat” yang terindikasi hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemilik modal perusahaan multinasional (Ludigdo, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012; Rodrik, 2012). Tentu pendekatan terkait melatih kepekaan sosial dan kesadaran sosial yang diberikan kepada para mahasiswa akuntansi sangatlah bergantung dengan konteks sosial-geografis kampus. Artinya, pendekatan lain memiliki kemungkinan untuk hadir sesuai konteks sosial dan geografis tertentu. Namun, perlu diingat agar kiranya niat atau filosofi dasar pendekatan yang akan dipilih haruslah tetap berpihak kepada rakyat Indonesia (Malaka, 1943).

C. KESIMPULAN

Dengan mencoba membumikan model pendidikan Tan Malaka dalam ruang-ruang kelas akuntansi. Bukan tidak mungkin, di masa depan akan hadir revolusi pendidikan etika akuntan yang akan berujung pada revolusi tindakan etika dan haluan Akuntan Indonesia yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi dengan penekanan perubahan model pembelajaran etika yang ditekankan dalam ruang-ruang perkuliahan, organisasi mahasiswa serta organisasi profesi akuntan. Yang mana merupakan modal sosial yang penting untuk menyongsong perubahan pendidikan etika akuntan. Tentu dengan syarat-syarat infrastruktur sosial yang lain seperti diterapkannya model pendidikan Tan Malaka secara luas dan dukungan organisasi profesi wajib hadir untuk mengawal dan mempercepat perubahan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bean, D. F., dan R. A. Bernardi. 2005. "Accounting ethics courses: A professional necessity". *The CPA Journal*, Vol. 75 No. 12, hlm: 64-65.
- BKPM. 2016. Siaran Pers: Realisasi Investasi TW I 2016 Rp 146,5 Triliun, Serap 327 Ribu Tenaga Kerja. Jakarta: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
- Blanthorne, C., S. E. Kovar, dan D. G. Fisher. 2007. "Accounting educators' opinions about ethics in the curriculum". *Issues in Accounting Education*, Vol. 22, No. 3, hlm: 355-390.
- BPS. 2016. "Data Tenaga Kerja Indonesia" <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981>. [diakses pada 10 November 2016].
- Burrell, G., dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann.
- Chan, S. Y. S., dan P. Leung. 2006. "The effects of accounting students' ethical reasoning and personal factors on their ethical sensitivity". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, No. 1, hlm: 436-457.
- Deegan, C. G. 2007. *Financial accounting theory*. Australia: McGraw-Hill Irwin.
- Fakih, M. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan and Globalisasi*. Yogyakarta: InsistPress.
- ILO. 2015. *Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak*. Kantor Perburuhan Internasional (ILO).
- Loeb, S. E. 2015. "Active Learning: An Advantageous Yet Challenging Approach to Accounting Ethics Instruction". *Journal Business Ethics*, Vol. 127, No. -, hlm: 221-230.
- Ludigdo, U. 2012. MEMAKNAI ETIKA PROFESI AKUNTAN INDONESIA DENGAN PANCASILA. In *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Etika Bisnis dan Profesi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ludigdo, U., dan A. Kamayanti. 2012. "Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator". *World Journal of Social Sciences*, Vol. 2, No. 6, hlm: 159 – 168.
- Malaka, T. 1921. *SI Semarang dan Onderwijs*. 1987 ed. Jakarta: Yayasan Massa.
- . 1943. *MADILOG*. Indonesia: -.
- Neimark, M., dan A. Tinker. 1986. "The social construction of management control system". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 11, No. 3, hlm: 369-396.

- Poeze, H. A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia I* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poli, W. I. M. 2010. *Tonggak-tonggak sejarah pemikiran ekonomi*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Rodrik, D. 2012. *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. Washington: Harvard University Press.
- Russell, K. A., dan C. S. Smith. 2003. " It's time for a new curriculum. ". *Strategic Finance*, Vol. 85, No. 6, hlm: 1-5.
- Shahib, H. M., dan S. A. Irwandi. 2016. "Violation regulation of financial services authority (FSA), financial performance, and corporate social responsibility disclosure". *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Vol. 19, No. 1, hlm: 141-154.
- Syaifudin. 2012. *Tan Malaka: Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Sosialis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Teja, H. 2016. *TAN sebuah novel*. Tangerang Selatan: Javanica.
- Tinker, A., dan R. Gray. 2003. "Beyond a critique of pure reason: from policy to politics and praxis in environmental and social research". *accounting, auditing, and accountability journal*, Vol. 16, No. 5, hlm: 727-761.
- Transparancy International. 2015. "Corruption Perception Index" <http://www.transparency.org/cpi2015>. [diakses pada 8 November 2016].
- Trisnaningsih, S. Year. "Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor". Artikel dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi X*, di Makassar.
- Weiss, J. W. 2009. *Business Ethics: A Stakeholders and Issues Management Approach 5ed* South-Western: Cengage Learning.
- Williams, J., dan R. J. Elson. 2010. "The Challenges and Opportunities of Incorporating Accounting Ethics Into The Accounting Curriculum". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 13, No. 1, hlm: 105-115.